



# HISTORIA VITAE

Seri Pengetahuan dan Pengajaran Sejarah

Volume 28, No. 2, Oktober 2014

ISSN - 0215-8809

- ☰ SEJARAH MANUSIA SEBAGAI SEJARAH PERADABAN: BELAJAR DARI  
FILSAFAT SEJARAH ARNOLD JOSEPH TOYNBEE  
Sutarjo Adisusilo, J.R.
  
- ☰ NYAI DALAM PERGUNDIKAN: PENDORONG MUNCULNYA KAUM INDO  
DI HINDIA BELANDA  
Hendra Kurniawan
  
- ☰ PENGGULINGAN PRESIDEN SOEKARNO DI BALIK PERISTIWA G30S  
Yulius Dwi Cahyono
  
- ☰ INDIA-PAKISTAN PASCA KOLONIAL (1964-1975: SHASTRI-INDIRA)  
B. Musidi
  
- ☰ FILIPINA DAN MASALAH SABAH  
A. Kardiyat Wiharyanto

Diterbitkan oleh :

Program Studi Pendidikan Sejarah – FKIP, Jurusan Ilmu Sejarah – Fakultas Sastra

Universitas Sanata Dharma

Mrican, Tromol Pos 29, Yogyakarta 55002

E-mail: [spps@staff.usd.ac.id](mailto:spps@staff.usd.ac.id)

# **HISTORIA VITAE**

## **SERI PENGETAHUAN DAN PENGAJARAN SEJARAH**

---

**HISTORIA VITAE** adalah majalah ilmiah yang berisi kumpulan hasil penelitian dan/atau karangan ilmiah mengenai kependidikan dan/atau kesejarahan dari para dosen dan alumni Program Studi Pendidikan Sejarah-FKIP dan Jurusan Ilmu Sejarah-Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma. Majalah ini terbit dua kali setahun: April dan Oktober.

Redaksi menerima naskah, baik yang berbahasa Indonesia, maupun berbahasa Inggris. Naskah harus ditulis sesuai dengan format yang berlaku di **HISTORIA VITAE**, dan harus diterima oleh redaksi paling lambat dua bulan sebelum terbit. Isi karangan yang dimuat tidak selalu mencerminkan pendapat Redaksi, maka tanggung jawab isi sepenuhnya di tangan penulis.

---

### **DEWAN REDAKSI**

Pemimpin Umum/Penanggung Jawab/

Pemimpin Redaksi

Sekretaris Redaksi

Anggota Redaksi

: Dr. Anton Haryono, M.Hum.

: Hendra Kurniawan, M.Pd.

: Drs. Sutarjo Adisusilo J.R., S.Th., M.Pd.

Dra. Sumini Theresia, M.Pd.

Drs. Y.R. Subakti, M.Pd.

Yulius Dwi Cahyono, M.Pd.

Drs. A. Kardiyat Wiharyanto, M.M.

Drs. B. Musidi, M.Pd.

---

### **REDAKTUR AHLI**

Dr. F.X. Baskara T. Wardaya, S.J., M.A. .... Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Dr. S. Nawiyanto ..... Universitas Jember

---

### **SEKRETARIAT ADMINISTRASI**

Junaidi Agus Sularto

---

### **ALAMAT REDAKSI**

Program Studi Pendidikan Sejarah-FKIP, Universitas Sanata Dharma

Mrican, Tromol Pos 29, Yogyakarta 55002

Telepon (0274) 513301, 515352; Fax. (0274) 562383

Telegram: SADHAR YOGYA

E-mail: [spps@staff.usd.ac.id](mailto:spps@staff.usd.ac.id)

---

# **HISTORIA VITAE**

## **SERI PENGETAHUAN DAN PENGAJARAN SEJARAH**

---

### DAFTAR ISI

<b>Daftar Isi</b> .....	i
<b>Editorial</b> .....	iii

<i>Sejarah Manusia sebagai Sejarah Peradaban: Belajar dari Filsafat Sejarah Arnold Joseph Toynbee</i> .....	107 - 135
<i>Sutarjo Adisusilo, J.R.</i>	

<i>Nyai dalam Pergundikan: Pendorong Munculnya Kaum Indo di Hindia Belanda</i> .....	136 - 153
<i>Hendra Kurniawan</i>	

<i>Penggulingan Presiden Soekarno di Balik Peristiwa G30S</i> .....	154 - 171
<i>Yulius Dwi Cahyono</i>	

<i>India-Pakistan Pasca Kolonial (1964-1975: Shastri-Indira)</i> ....	172 - 201
<i>B. Musidi</i>	

<i>Filipina dan Masalah Sabah</i> .....	202 - 214
<i>A. Kardiyat Wiharyanto</i>	

## EDITORIAL

**HISTORIA VITAE** kali ini kembali menghadirkan lima artikel ilmiah dengan beragam tema. Diawali tulisan dari Sutarjo Adisusilo, J.R. yang mengkaji mengenai **Sejarah Manusia sebagai Sejarah Peradaban: Belajar dari Filsafat Sejarah Arnold Joseph Toynbee**. Tulisan berikutnya bertemakan Sejarah Sosial dari Hendra Kurniawan yang berjudul **Nyai dalam Pergundikan: Pendorong Munculnya Kaum Indo di Hindia Belanda**. Berikutnya Yulius Dwi Cahyono menyajikan tulisan tentang Peristiwa 1965 dengan judul **Penggulingan Presiden Soekarno di Balik Peristiwa G30S**.

Dua tulisan terakhir berasal dari dua orang dosen senior di Program Studi Pendidikan Sejarah. Tulisan B. Musidi memaparkan mengenai Sejarah Asia Selatan berjudul **India-Pakistan Pasca Kolonial (1964-1975: Shastri-Indira)**. Pungkasan, A. Kardiyat Wiharyanto kembali menambah pengetahuan kita mengenai Sejarah Asia Tenggara dengan menyajikan tulisan berjudul **Filipina dan Masalah Sabah**.

Akhir kata, selamat membaca dan terus berkarya.

Redaksi

**NYAI DALAM PERGUNDIKAN:  
PENDORONG MUNCULNYA KAUM INDO  
DI HINDIA BELANDA**

**Hendra Kurniawan**

Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP  
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

**ABSTRAK**

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai keberadaan nyai dalam praktik pergundikan yang mengakibatkan munculnya kaum Indo di Hindia Belanda. Nyai adalah perempuan pribumi yang diambil sebagai istri oleh orang Eropa khususnya Belanda pada masa kolonialisme. Perkawinan tidak sah ini sering disebut pergundikan. Akibat dari perkawinan tersebut lahirlah keturunan campuran Indonesia-Belanda atau kaum Indo. Nyai sebagai ibu dari kaum Indo selayaknya mendapat tempat dalam sejarah Indonesia. Hal ini menjadi salah satu wujud perhatian dan penghargaan pada kaum perempuan.

**ABSTRACT**

This article aims to explain the existence of nyai in concubinage practices, which resulted emergence of Eurasians in Dutch East Indies. Nyai is a native that married with Europeans, especially Netherlander in colonialism era. This illegal marriage is often called as concubinage. The impact of the marriage was born of Eurasians. Nyai as the mother of Eurasians should find a place in Indonesia history. This is becoming a form of significant attention and respect to women.

Keywords: nyai, pergundikan, kaum Indo, Hindia Belanda

## **PENDAHULUAN**

Sejarah mengenai kaum perempuan, khususnya di Indonesia, memang jarang dikaji. Perempuan dalam Sejarah Indonesia mendapat sedikit tempat ketika membicarakan masa pergerakan nasional. Saat itu memang mulai tumbuh kesadaran kaum perempuan untuk bangkit dan berusaha memperoleh pendidikan agar tidak dianggap sebagai warga negara kelas dua. Di luar itu, kaum perempuan hampir tidak disebut dalam sejarah Indonesia. Padahal ada banyak hal mengenai perempuan yang menarik untuk diungkap lebih mendalam sebagai bagian dari sejarah nasional.

Perempuan tidak pernah kehilangan kisah untuk diceritakan. Dalam kehidupannya perempuan dihadapkan pada berbagai permasalahan yang tidak hanya bersifat personal, namun juga berpengaruh pada dinamika sosial dan budaya yang lebih luas. Perempuan memiliki peran yang tidak sedikit dalam perjalanan sejarah bangsa ini. Pengetahuan mengenai sejarah perempuan tidak hanya penting untuk masa lalu namun juga untuk masa kini dan yang akan datang.

Berbicara mengenai sejarah kaum perempuan berarti berbicara mengenai kemanusiaan dan egaliter. In Bene Ratih (2005:319) mengungkapkan bahwa kata perempuan berasal dari kata empu yang merujuk pada gelar kehormatan bagi orang yang berkemampuan atau ahli. Istilah perempuan lebih menunjuk pada seseorang dalam konteks eksistensi dirinya daripada menggunakan sebutan wanita. Perempuan diartikan sebagai orang yang memiliki otoritas atas dirinya. Sayangnya dalam perjalanan kehidupan kaum perempuan di Indonesia pernah mengalami fase panjang kehilangan otoritas diri akibat gempuran budaya patriarkal.

Jauh sebelum kolonialisme masuk, perempuan Jawa sudah harus memperoleh status sebagai *kanca wingking* (teman di belakang atau dapur) bagi suaminya. Nasib istri sepenuhnya bergantung pada suami. Istilahnya *swarga nunut, neraka katut* yang artinya ke surga ikut menumpang, jika ke neraka pun ikut terbawa (Sarlito W. Sarwono, 2004:xi). Perempuan ditempatkan dalam posisinya sebagai sosok yang lemah dan tidak berdaya. Tak heran apabila Ania Loomba (2003:301-

302) sejalan dengan Gayatri Spivak yang menempatkan perempuan sebagai subjek *subaltern* yang tertindas, tertekan, dan inferior. Dalam Stephen Morton (2008:172), Spivak lebih lanjut mengajukan pertanyaan mendasar di dalam esainya yaitu “*Can the Subaltern Speak?*”

Masuknya kolonialisme Belanda yang membawa budaya Barat ke Indonesia tidak membawa perubahan nasib kaum perempuan, justru perempuan harus menghadapi *double marginalisasi* oleh laki-laki pribumi sekaligus penindasan oleh Belanda. Kaum perempuan semakin dibungkam dan menjadi korban. Ini disebabkan sejak masuknya pegawai-pegawai VOC pada awal abad 17 hingga pemerintah Hindia Belanda berkuasa sampai awal abad 20, terjadilah praktik pergundikan. Orang kulit putih, terutama Belanda banyak mengambil gundik perempuan Asia, khususnya Jawa. Perempuan-perempuan itu kebanyakan budak perempuan di rumah tangga Eropa. Mereka melakukannya secara terpaksa karena tidak mempunyai pilihan lain lagi, meskipun tak jarang ada pula yang memang mengalami perasaan saling mencintai.

Cukup sulit menunjukkan garis pemisah antara pergundikan dengan pelacuran. Meskipun demikian para gundik itu bukanlah pelacur karena mereka tidak menjual diri demi uang kepada setiap laki-laki yang menginginkannya. Para gundik ini diambil sebagai istri, meskipun tidak sah, dan memberikan keturunan bagi suami kulit putih mereka. Banyak istilah untuk menamakan gundik, namun yang paling umum adalah nyai. Hubungan dan hidup bersama para nyai dengan laki-laki Belanda hingga memiliki keturunan selama masa kolonialisme inilah yang melahirkan orang campuran Indonesia-Belanda atau yang biasa disebut kaum Indo.

Tulisan singkat ini akan berbicara tentang praktik pergundikan yang mengakibatkan munculnya kaum Indo di Hindia Belanda. Nyai telah menjadi ibu sekaligus nenek moyang bagi para Indo. Harapannya tulisan ini dapat menambah kajian sejarah mengenai perempuan Indonesia dengan ketidakadilan yang harus diterimanya. Dengan demikian kaum perempuan di Indonesia dapat lebih memperoleh perhatian, penghargaan, dan rasa hormat yang sejak dulu sulit mereka dapatkan.

### **PRAKTIK PERGUNDIKAN DI HINDIA BELANDA**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam jaringan (daring) disebutkan bahwa gundik berarti istri tidak resmi, selir, atau perempuan piaraan. Pergundikan berarti suatu praktik dalam masyarakat berupa ikatan hubungan di luar perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan alasan tertentu. Alasan yang umum ialah karena perbedaan status sosial, ras, dan agama. Memasuki masa kolonialisme, pergundikan muncul sebagai strategi dari bangsa pendatang agar dapat diterima oleh penduduk asli dengan cara menikahi perempuan pribumi. Selain itu para pendatang ini juga biasanya tidak membawa istri dari negeri asalnya sehingga mengambil istri penduduk pribumi atau sekedar menjalin hubungan tanpa status.

Praktik pergundikan sebenarnya sudah ada dalam sejarah kerajaan-kerajaan di Nusantara. Raja Mataram misalnya memiliki banyak selir yang tak beda statusnya dengan gundik. Akan tetapi pada masa itu praktik ini hanya terjadi dalam skala kecil dan berlaku bagi sebagian kecil orang yaitu raja atau bangsawan. Ini berbeda dengan masa Hindia Belanda, pergundikan menjadi terorganisir dan terlembagakan, meskipun dalam pelaksanaannya tidak jarang menimbulkan masalah (Reggie Baay, 2010:103).

Kedatangan pegawai VOC (*Verenigde Oostindische Compagnie*) di Nusantara sekitar tahun 1600-an menjadi awal dimulainya pergundikan dan munculnya para nyai pada masa penjajahan. Bermula dari dipekerjakannya para perempuan pribumi untuk mengurus rumah tangga para pegawai kulit putih yang lambat laun tidak hanya berkulat pada urusan dapur namun juga menemani majikannya tidur. Relasi kuasa antara majikan dengan budak perempuannya ini membuat pergundikan menjadi sebuah sistem yang sulit diberantas. Pergundikan terus berlanjut hingga bertahun-tahun selama masa kolonial karena sistem ini juga kemudian diteruskan oleh keturunannya atau orang-orang Indo (Reggie Baay, 2010:1).

Meskipun bertahan lama namun bukan berarti pergundikan tidak pernah mendapat tentangan. Gubernur Jenderal VOC keempat, Jan Pieterszoon Coen (1618-1623 dan 1627-1629) menganggap bahwa pola



hidup bersama (*samenleven*) para lelaki Eropa, khususnya Belanda, dengan para budak perempuan pribumi ini merupakan penyelewengan. Menurut Coen, pergundikan mengarah pada berbagai perilaku yang janggal, tidak terkendali, dan membahayakan kepentingan kolonial. Coen mengeluarkan larangan memelihara seorang atau lebih gundik di rumah, tempat tinggal atau tempat lain, dengan penjagaan, apapun yang terjadi. Larangan ini mulai berlaku pada 11 Desember 1620 (Tineke Hellwig, 2007:5; Reggie Baay, 2010:2).

Sebagai alternatif, Coen meminta agar *Heeren XVII*, penentu garis kebijakan VOC, untuk mengirimkan calon-calon pengantin perempuan kulit putih ke Hindia Belanda. Mereka diwajibkan menikah dengan para pegawai VOC yang ada di Hindia Belanda dan sebagai gantinya mereka mendapat pelayaran gratis serta mas kawin. Kebanyakan dari mereka bukan gadis baik-baik. Di Hindia Belanda mereka senang mabuk-mabukan dan bertindak di luar aturan agama. Reggie Baay (2010:3) menjelaskan bahwa baru pada tahun 1622 didatangkan para perempuan yang disebut *compagniesdochters* dari rumah-rumah yatim piatu dengan reputasi baik di Belanda. Perempuan-perempuan ini dapat memenuhi kriteria Coen untuk membangun masa depan koloni Hindia Belanda.

Kebijakan ini ternyata tidak membuat jumlah praktik pergundikan pada masa itu berkurang secara signifikan. Menariknya bahwa pergundikan saat itu tidak hanya melibatkan laki-laki Eropa, namun ada juga perempuan Eropa yang menjalin hubungan seksual dengan laki-laki pribumi. Untuk itulah Coen segera menambahkan ketentuan bahwa larangan atas pergundikan tidak hanya berlaku untuk laki-laki namun juga untuk perempuan Eropa (Reggie Baay, 2010:3).

Kebijakan Coen ini ternyata tidak berlangsung lama. Berbagai protes bermunculan terhadap politik pengantin kulit putih ini baik di Belanda maupun di Hindia Belanda. Hal ini disebabkan munculnya kekhawatiran bahwa perkawinan tersebut justru akan menciptakan *trekker* dan bukan *blijver*. *Trekker* adalah penduduk Eropa yang tidak berkeinginan menetap di Hindia Belanda. Mereka hanya mengumpulkan modal untuk kepentingan pribadi, setelah itu kembali ke tanah air bersama istri dan anak-anak mereka meninggalkan Hindia Belanda.

Padahal demi mempersiapkan masa depan daerah koloni yang dibutuhkan adalah *blijver*, yaitu penduduk Eropa yang menetap permanen di Hindia Belanda (Joost Cote dan Loes Westerbeek, 2004:xl).

Reggie Baay (2010:4) juga menambahkan terkait dengan soal kesehatan. Para *Kreol* atau anak-anak yang lahir di Hindia Belanda dari hubungan sesama kulit putih ternyata tidak memiliki ketahanan tubuh yang baik. Kaum *Kreol* tidak tahan dengan iklim tropis dan sering sakit-sakitan. Jika ingin membangun masa depan koloni Hindia Belanda, maka diperlukan keturunan yang kuat dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan tempatnya hidup. Untuk itu perkawinan antara laki-laki kulit putih dengan perempuan pribumi harus diutamakan.

Tineke Hellwig (2007:6) menjelaskan bahwa pasca pemerintahan Coen, dikeluarkan suatu Surat Keputusan tahun 1632 yang isinya Belanda tidak akan membiayai lagi perempuan-perempuan Eropa yang hendak datang ke Hindia Belanda. Bahkan pada tahun 1650-an, Belanda sama sekali membatasi imigrasi perempuan ke Hindia Belanda. Tujuannya untuk menciptakan komunitas yang stabil dan permanen (*blijver*) di Hindia Belanda. Para gundik dan anak-anaknya bahkan diberi kewarganegaraan suami atau ayah mereka. Laki-laki Eropa yang telah berkeluarga dengan perempuan pribumi di Hindia Belanda juga tidak dibenarkan kembali ke tanah air mereka.

Kebijakan ini semakin dipertegas pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Carel Reyniersz (1650-1653) dan Joan Maetsuyker (1653-1678). Mereka berdua merupakan pendukung perkawinan antara pegawai VOC dengan perempuan pribumi. Reggie Baay (2010:4) mencatat bahwa ada banyak keuntungan dari perkawinan tersebut antara lain tidak membutuhkan biaya pelayaran, keterikatan dengan tanah kelahiran akan membuat para perempuan pribumi membujuk suami mereka untuk tetap tinggal di Hindia Belanda, dan selain itu perempuan pribumi tidak terlalu serakah dibanding perempuan Belanda. Ini berbanding terbalik dengan perempuan Eropa yang berusaha mempertahankan gaya hidup Belanda dengan standar dan budaya borjuisnya di Hindia Belanda (Tineke Hellwig, 2007:6).

Pengiriman para perempuan Eropa ke Hindia Belanda kemudian dihentikan. Seiring dengan itu praktik pergundikan semakin tersistem sehingga muncullah sebutan Nyai bagi para gundik yang jumlahnya terus bertambah. Istilah nyai atau nyahi sebenarnya mengacu pada bahasa Bali yang artinya adik perempuan atau perempuan muda. Sebutan nyai juga digunakan dalam wilayah budaya Sunda yang berarti wanita dewasa. Pada masa Hindia Belanda saat praktik pergundikan semakin meluas, istilah nyai memiliki konotasi lain. Nyai diartikan sebagai gundik, selir, atau wanita simpanan para pejabat dan serdadu Belanda.

Reggie Baay (2010:58-59) menjelaskan bahwa dalam abad 19, banyak orang Eropa menggunakan sebutan-sebutan lain yang memiliki kecenderungan untuk merendahkan dan menghina nyai. Sebutan yang paling halus adalah *inlandse huishoudster* yang berarti pembantu rumah tangga. Para nyai yang dipelihara di dalam tangsi-tangsi tentara kolonial biasa disebut *moentji*. Istilah ini merupakan pelesetan dari kata *mondje* yang berarti bermulut kecil. Sebutan ini merujuk pada kenyataan bahwa para perempuan gundik dalam barak-barak tentara merupakan perempuan penurut, tidak banyak bicara, tidak protes, dan tunduk pada tuannya. Terkadang muncul pula julukan *snaar/snoer* (senar atau dawai) yang digunakan untuk menyebut seorang pelacur atau perempuan panggilan. Para gundik juga sering disebut sebagai *meubel* (perabot), *inventarisstuk* (barang inventaris), maupun *boek* (buku) atau *woordenboek* (kamus) yang siap menjadi penerjemah bahasa pribumi untuk majikan atau suami mereka.

Berbagai sebutan itu memiliki satu maksud yaitu menegaskan bahwa meskipun mereka menjadi istri seorang majikan kulit putih, namun kedudukan nyai tidak sederajat. Tugas utama nyai tetap berada di bawah perintah dan melayani dengan patuh kemauan tuannya. Reggie Baay (2010:59) mengutip sebuah roman berjudul *De Godin die Wacht* karya Augusta de Wit tahun 1903 yang menceritakan Naila, seorang nyai dari Jaksa Muda Van Heemsbergen sebagai berikut:

Sang gundik bisa ada di rumah, bisa juga tidak.  
Keberadaannya selalu tak terlihat. Dengan kaki telanjang ia bergerak tanpa suara di atas lantai batu. Sang jaksa pun tidak

mendengar suara maupun gumamannya. Ia mengetahui kehadiran sang gundik dari kerapian dan kebersihan barang-barang yang ada. Makanan lezat yang tersaji tepat waktu di atas meja, minuman-minuman segar dalam botol yang baru diambil dari lemari es, pakaiannya tergeletak siap untuk dikenakan ... Namun ia tidak melihat ataupun mendengar sang gundik, kecuali kalau dipanggil. Tanpa disadari ia datang mendekat dan berdiri di depan sang jaksa dengan kepala menunduk. Ia hanya mempunyai satu jawaban, yang diucapkan dengan pelan, atas semua yang dikatakan jaksa: “Ya, Tuan”.

Kisah ini secara sederhana hendak menggambarkan bahwa dalam posisinya yang lemah, seorang nyai boleh dikatakan tidak memiliki hak apapun. Nyai tidak memiliki hak atas posisinya sendiri sebagai istri, apalagi hak atas anak yang dilahirkan dari rahimnya. Setiap saat mereka dapat ditinggalkan begitu saja oleh suami yang juga majikannya. Bahkan di kalangan ketentaraan, seorang nyai seringkali diserahkan begitu saja kepada laki-laki Eropa lain sebelum ditinggalkan (Tineke Hellwig, 207:38). Nasib kaum perempuan yang harus menjadi nyai dalam masyarakat Hindia Belanda tak urung sekedar sebagai alat pemuas tuannya.

### **Pergundikan Tangsi**

Pergundikan di dalam tangsi-tangsi ketentaraan lebih mengerikan dibandingkan dalam kelompok sipil Eropa biasanya. Perilaku asusila tanpa pernah mendapatkan sanksi biasa dipertontonkan di dalam tangsi. Seorang nyai tangsi atau yang biasa disebut *moentji* berperan sebagai pembantu, teman tidur, istri, dan juga ibu bagi anak-anak mereka. Mereka menjadi *moentji* bisa karena diambilalih dari rekan tentara pribumi atau ada pula yang memang sengaja menawarkan diri untuk menjadi gundik bagi para serdadu yang baru datang dari Eropa. Mereka yang menawarkan diri ini biasanya *moentji* profesional yang sudah berpengalaman tinggal di tangsi sehingga lebih digemari untuk dijadikan gundik. Bagi mereka ini menjadi *moentji* merupakan sebuah harapan dan kesempatan untuk lepas dari kemiskinan (Reggie Baay, 2010:100).

Reggie Baay (2010:102) menambahkan bahwa di dalam tangsi ada juga nyai Indo yaitu anak perempuan yang dilahirkan dari pergundikan tangsi. Kebanyakan usia mereka antara 12-35 tahun, bahkan ada yang diketahui baru berusia 10-11 tahun namun sudah terlibat dalam pergundikan. Seorang nyai yang berusia lebih dari 30 tahun sudah dianggap tua dan harus bersiap-siap apabila sewaktu-waktu mereka dibuang. Nyai yang tidak mampu mempertahankan kedudukannya maka akan mendapat “surat lepas”. Setelah mereka pergi maka tidak akan ada lagi masa depan untuknya.

#### **Pergundikan dalam Perkebunan Deli**

Selain dalam masyarakat sipil dan tangsi-tangsi tentara kolonial, praktik pergundikan juga terjadi di perkebunan, misalnya Deli. Reggie Baay (2010:129) menjelaskan ciri khas pergundikan dalam perkebunan Deli yaitu hubungan yang sangat timpang antara laki-laki Eropa dengan kuli perempuan yang menjadi nyainya. Hubungan yang terjalin atas dasar kekuasaan laki-laki kulit putih ini lebih buruk dari yang terjadi di tengah masyarakat sipil dan tangsi. Para nyai seringkali memperoleh hukuman dan siksaan yang kejam apabila tidak menuruti kemauan tuannya.

Pergundikan di tangsi dan perkebunan akan membawa akhir yang tidak lebih baik daripada pergundikan di kalangan sipil. Saat seorang laki-laki Eropa dipindahtugaskan atau kembali ke negaranya maka hanya ada empat kemungkinan bagi nyai dan anak-anaknya. Reggie Baay (2010:103) menjelaskannya sebagai berikut: *Pertama*, sang nyai dan anak-anaknya ikut bersama tuannya ke tempat baru. *Kedua*, nyai dan anak-anaknya ditinggal begitu saja tanpa nasib yang pasti. *Ketiga*, nyai dan anak-anaknya dialihkan kepada rekan laki-laki Eropa lainnya yang masih tinggal di Hindia Belanda. *Keempat*, anak-anaknya dibawa serta atau ditiptikan di suatu tempat, sedangkan sang nyai dapat mencari hubungan pergundikan yang baru atau kembali ke kampungnya.

Kemungkinan terakhir ini yang paling menyedihkan karena seorang gundik yang tidak laku lagi dan harus kembali ke kampung akan sulit diterima dalam masyarakat. Mereka juga akan sulit menemukan pasangan pribumi. Satu-satunya jalan untuk menyambung hidup maka para bekas gundik terpaksa melacurkan diri dan terjun ke dalam dunia prostitusi

yang saat itu juga menjadi komoditas di Hindia Belanda. Terutama saat pembangunan jalan-jalan kereta api yang menghubungkan kota-kota di Jawa, mereka dibutuhkan untuk melayani hasrat seksual para pekerja. Tak heran apabila hingga kini tempat pelacuran banyak ditemukan di dekat stasiun kereta api.

### **Akhir Pergundikan di Hindia Belanda**

Pada awal tahun 1900-an, upaya untuk meningkatkan kedudukan perempuan pribumi mengalami kemajuan. Bermula dari pelaksanaan program pendidikan dalam politik etis mulai memberi kesempatan pada perempuan untuk mengenyam pendidikan. Beberapa tokoh gerakan emansipasi perempuan bermunculan, salah satunya yang paling menonjol ialah Raden Ajeng Kartini. Cara jitu yang dilakukan Kartini dalam perjuangannya ialah dengan menarik simpati kaum feminis Belanda melalui tulisan-tulisannya.

Pada tanggal 22-26 Desember 1928 berbagai organisasi perempuan berhasil menyelenggarakan Kongres Perempuan Indonesia di Yogyakarta. Hasil pentingnya yaitu berdirinya Perikatan Perempuan Indonesia (PPI). Sebelum kongres PPI yang kedua, dalam pertemuan umum perwakilan beberapa perkumpulan perempuan di Bandung tanggal 13 Oktober 1929 mulai diangkat berbagai persoalan perempuan termasuk mengenai praktik poligami, pergundikan, dan pelacuran (CoraVreede-De Stuers, 2008:135). Kaum perempuan mulai berani bersuara. Munculnya berbagai perkumpulan perempuan membawa pengaruh dengan berkurangnya praktik-praktik marginalisasi terhadap kaum perempuan. Hal ini akan semakin jelas terasa saat kolonial Belanda hengkang dari Indonesia. Peran kaum perempuan semakin tampak.

Pecahnya Perang Dunia II dan masuknya Jepang ke Indonesia membuat keluarga-keluarga yang terbentuk dari praktik pergundikan bercerai-berai. Para laki-laki Eropa ditawan, namun para nyai yang berdarah pribumi dibiarkan bebas. Sementara anak-anak mereka yang berdarah campuran diharapkan dapat memiliki keterikatan dengan penduduk pribumi. Untuk itu keberadaan seorang ibu dengan darah pribumi mendadak menjadi sangat penting bagi anak-anak yang lahir dari hubungan campur. Berkat para ibu pribumi ini, mereka akan

mendapatkan surat *asal-oesoel* sebagai bukti keturunan Asia dari pemerintah pendudukan Jepang (Reggie Baay, 2010:223).

Di masa kemerdekaan, terjadilah kekacauan sosial yang berdampak bagi keberadaan para nyai dan keturunannya. Perempuan pribumi yang menikah dengan laki-laki Eropa mengalami konflik kesetiaan untuk memilih suami Eropa dan anak-anaknya atau bangsanya sendiri. Selisih usia yang jauh antara nyai dengan suami kulit putihnya terkadang menjadi jawaban. Banyak nyai yang telah menjadi janda di masa dekolonisasi karena suami mereka telah meninggal akibat perang atau usia lanjut. Akhirnya mereka cenderung memilih tinggal di Republik Indonesia, negara yang baru. Mereka harus kehilangan kontak dengan anak-anak mereka yang tinggal di Belanda sebagai orang Eropa. Meskipun tak jarang dari para perempuan itu yang ikut pergi ke Belanda dan menetap di sana terutama pasca penyerahan kedaulatan tahun 1949 (Reggie Baay, 2010:224).

#### **KAUM INDO DI HINDIA BELANDA**

Anak-anak yang dilahirkan dari hubungan pergundikan disebut sebagai *voorkinderen*. Sebutan ini muncul karena mereka lahir dari hubungan laki-laki Eropa dengan perempuan pribumi sebelum akhirnya menikah lagi dengan perempuan Eropa. Sejak tahun 1828, para laki-laki Eropa boleh mengakui anak-anak mereka yang lahir dari hubungan pergundikan. Pilihan lainnya ialah dengan tidak mengakui namun mendaftarkan mereka ke dalam daftar kelahiran. Pendaftaran ini mewajibkan sang ayah Eropa merawat dan mendidik anak-anak tersebut atau adopsi. Sejak itu seorang anak yang lahir di luar nikah diberi nama keluarga sang ayah namun dieja terbalik, misalnya Riemsdijk menjadi Kijdsmeir, Vermehr menjadi Rhemrev, Grovestins menjadi Snitsevorg, Pieterse menjadi Esreteip, Jansen menjadi Nesnaj, dan sebagainya. (Tineke Hellwig, 2007:39; Reggie Baay, 2010:68)

Tineke Hellwig (2007:39) juga menjelaskan adanya perubahan konstitusi di Belanda tahun 1848 membuat perundang-undangan di Hindia Belanda ikut berubah. Sejak itu agama tidak menjadi penghalang pernikahan. Akibatnya setelah tahun 1848 terjadi sejumlah perkawinan

campur yang sah dari praktik pergundikan ini. Akan tetapi jumlahnya tidak seberapa karena formalitas ini menghabiskan banyak waktu dan biaya, sehingga lebih banyak yang memilih untuk melanjutkan kehidupan dalam pergundikan daripada menikah.

Reggie Baay (2010:169) menyebutkan bahwa anak-anak Indo-Eropa sebagai hasil pergundikan ini awalnya disebut sebagai *Inlandse kinderen* yang berarti anak-anak pribumi, namun kemudian lebih sering disebut sebagai orang Indo. Bambang Purwanto dalam pengantarnya pada buku *Recalling the Indies* (Joost Cote dan Loes Westerbeek, 2004:v) menyebutkan bahwa “Indo adalah terminologi yang sering digunakan oleh masyarakat umum maupun dalam tulisan ilmiah untuk merujuk pada realitas sejarah yang berkaitan dengan kelompok sosial campuran Asia-Eropa, khususnya campuran antara penduduk lokal dengan orang Belanda”.

Robert van Niel (1984:27) mencatat bahwa pada tahun 1900 terdapat sekitar 70.000 orang Eropa di Jawa. Dari jumlah itu hanya seperempatnya saja Eropa totok (asli) yang lahir di Eropa dan datang ke Hindia Belanda. Sisanya sekitar 50.000 orang merupakan kaum Indo yang diperlakukan sebagai bagian dari masyarakat Eropa meskipun tidak semuanya berdarah Eropa. Banyak kaum Indo ini yang telah diserap ke dalam penduduk pribumi dan tidak menganggap dirinya sebagai orang Eropa.

Kenyataan ini sebenarnya menunjukkan bahwa cita-cita membentuk *blijver* sebenarnya telah terwujud. Kaum Indo jumlahnya jauh lebih banyak daripada Belanda totok. Meskipun demikian kebanyakan posisi penting dalam pemerintahan masih selalu dipegang oleh orang Belanda asli. Orang *kreol* maupun Indo hanya diberi posisi tertentu yang tidak strategis. Faber dalam tulisannya di *Oud Soerabaia* yang dikutip oleh Djoko Soekiman (2000:24) menyebutkan bahwa kriteria kedudukan seorang keturunan Eropa di Hindia Belanda pada abad 19 didasarkan pada tempat seseorang dilahirkan. Mereka yang lahir di negeri Belanda dianggap keturunan murni (*volbloed*) sehingga kedudukannya lebih dihormati daripada mereka yang berdarah Belanda namun dilahirkan di Hindia Belanda (*kreol, mestizo, dan liplappen*).



Apalagi bagi mereka yang keturunan campuran *Eurasia* atau Indo (Djoko Soekiman menggunakan istilah Indis sebagai identitas diri kelompok tersebut) tentu semakin dianggap sebagai kelas sosial yang berbeda.

Diskriminasi ini tidak dapat dilepaskan dari konsep superioritas dan inferioritas yang masih tetap terjadi. Setelah dua abad lebih ternyata pemikiran Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon Coen soal citra buruk kaum Indo masih lekat. Dalam Reggie Baay, 2010:12-13), Coen berpendapat bahwa mereka yang lahir dari pergundikan akan mengumpulkan sifat-sifat negatif dari kedua ras yang bercampur itu sehingga menghasilkan karakter yang buruk. Anak-anak gundik, terutama yang perempuan, hanya akan sibuk mengejar kesenangan dan menghabiskan uang. Sementara yang laki-laki juga tidak jauh berbeda, mereka dianggap bodoh, rendah diri, dan tidak dapat dipercaya.

Terkait dengan diskriminasi jabatan ini, Reggie Baay (2010:13) lebih lanjut mencontohkan bahwa hanya laki-laki kelahiran Belanda yang mendapat kesempatan untuk mencapai kedudukan tinggi di wilayah pendudukan. Mereka yang dilahirkan di Hindia Belanda (*Kreol* maupun Indo) hanya dijadikan pegawai rendah seperti juru tulis atau asisten pegawai. Untuk itulah banyak ayah kulit putih yang kaya mengirimkan anak laki-laki mereka dari hasil pergundikannya ke Belanda untuk bersekolah sehingga nantinya dapat meraih status sosial yang tinggi. Salah satunya yang berhasil ialah Dirck van Cloon yang lahir di Batavia tahun 1684 dari seorang nyai. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Belanda, Cloon merintis karier hingga berhasil menjadi gubernur jenderal. Tentu ini hanya sebagian kecil saja, kebanyakan kaum Indo tetap ditempatkan pada posisi pinggir dibanding orang Eropa murni.

#### **Pencarian Identitas Kaum Indo**

Kondisi yang tidak mengenakkan ini membuat kaum Indo terus berusaha untuk memperoleh identitas diri. Setelah UU tentang kawin campur diberlakukan pada tahun 1848, Reggie Baay (2010:72) mencatat bahwa tahun 1898 keluarlah *Gemengde Huwelijken Regeling* di Hindia Belanda. Peraturan ini menentukan bahwa perempuan pribumi yang menikah dengan laki-laki Eropa secara otomatis mendapat status sebagai orang Eropa. Sebaliknya perempuan Eropa yang menikah dengan laki-

laki pribumi otomatis mengikuti status suaminya menjadi seorang pribumi. Ini berlaku juga untuk anak-anak mereka. Sebelumnya pada 1892 juga sudah lebih dulu diberlakukan *Rijkswet op het Nederlandschaap* atau UU Kewarganegaraan Belanda. Di dalamnya menyebutkan bahwa anak yang lahir dari hubungan campur memperoleh status kewarganegaraan Belanda secara yuridis apabila telah diberikan pengakuan dari garis keturunan ayah melalui daftar kelahiran sesuai aturan tahun 1828.

Dalam praktiknya di Hindia Belanda selalu ada perbedaan antara orang Eropa asli dengan yang Indo. Secara yuridis dapat dikatakan bahwa anak-anak yang lahir dari pergundikan dan memperoleh pengakuan menjadi orang Eropa hanya karena rekayasa hukum. Dengan demikian pengakuan yang dilakukan oleh seorang ayah kulit putih terhadap anaknya merupakan hal yang esensial. Jika pengakuan tidak diberikan maka secara yuridis anak-anak tersebut akan diperhitungkan sebagai golongan pribumi (Reggie Baay, 2010:72).

Kenyataan ini membuat kaum Indo berusaha mencari pengakuan atas dirinya. Mereka mencari identitas dan kulturnya sendiri. Fransisca C. Fanggidaej (2006:31) mengungkapkan alasan pencarian identitas itu sebagai berikut:

... mereka juga merasa tidak diterima oleh masyarakat Belanda [maupun] di pihak lain karena mereka berbahasa Belanda, intelektualitas Belanda, bergaya hidup dan pembawaan yang serba Belanda. Secara sosial komunitas Indo ini diberi kemudahan di atas orang-orang pribumi, orang-orang *inlanders* alias golongan masyarakat yang paling bawah. ... [mereka] akan naik pitam jika dibilang *inlanders*. ... Sebagai kata, bobot yang terkandung dalam istilah “inlander” dalam konteks masyarakat kolonial Belanda dahulu, barangkali sama seperti istilah “Cina” dalam konteks masyarakat Indonesia semasa Orde Baru.

Djoko Soekiman (2000:27-28) menjelaskan bahwa kaum Indo berusaha menciptakan kelas sosial bahkan budaya tersendiri yang disebut Indis. Kaum Indo memiliki unsur-unsur esensial yang menonjol sebagai

kelompok yang khas. Mereka memiliki latar belakang penderitaan yang sama sebagai golongan keturunan (Indo Belanda/Eropa), sebagai pejabat bawahan pemerintah kolonial, dan sebagai golongan dalam tingkat masyarakat jajahan yang berbeda dengan rakyat kebanyakan (pribumi). Mereka merasa berada di antara dua lingkup sosial budaya yaitu Belanda dan pribumi.

Kelompok sosial dan budaya Indis yang mereka ciptakan ini ternyata juga mewadahi pergulatan sosial yang dihadapi oleh kaum priyayi Jawa. Kaum priyayi sebagai bangsawan (sebagian besar menjadi pegawai pemerintah kolonial) juga merasa memiliki status sosial yang lebih tinggi dari rakyat kebanyakan, namun mereka juga bukan bagian dari orang-orang Eropa atau Belanda. Kaum priyayi dan orang Indo sama-sama merasa senasib. Fenomena historis ini semakin mendukung perkembangan pola hidup gaya Indis. Djoko Soekiman (2000:28) menyebutkan beberapa faktor penentunya yaitu: (1) adanya nasib dan penderitaan yang sama sebagai rakyat jajahan; (2) bagi kaum Indo mereka merasa sudah takdir dilahirkan dari campuran Eropa dan Jawa; (3) keinginan untuk hidup lebih baik dari golongan masyarakat kebanyakan; (4) sama-sama mengabdikan atau bekerja pada penguasa jajahan; (5) sama-sama beruntung dapat memperoleh kesempatan pendidikan yang tinggi.

Berbagai faktor psikologis ini membuat beberapa orang Indo justru memiliki ikatan yang lebih kuat dengan masyarakat pribumi dan tanah air kelahirannya (Indonesia) daripada dengan negeri Belanda. Salah satu contohnya adalah Ernest Francois Eugene Douwes Dekker yang belakangan mengganti nama menjadi Danudirja Setiabudi. Di dalam tubuhnya mengalir darah Belanda, Prancis, Jerman, dan Jawa namun semangat perjuangannya bagi Indonesia sangat menggelora. Pemerintah kolonial Belanda memberinya cap sebagai orang berbahaya.

Douwes Dekker lahir di Pasuruan, Jawa Timur tanggal 8 Oktober 1879. Setelah malang-melintang bergelut di dunia pers, Douwes Dekker bersama dr. Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soewardi Soerjaningrat (keduanya priyayi Jawa) membentuk *Indische Partij* (IP) tanggal 6 September 1912. Emile Schwidder (2012:160) dalam Seri Buku Tempo

Douwes Dekker: Sang Inspirator Revolusi menjelaskan bahwa “IP dengan slogan *Indie voor Indiers* dideklarasikan sebagai partai politik bagi semua kelompok etnis untuk memperbaiki nasib orang Indo-Eropa, orang Jawa, dan bangsa lain yang tinggal di Nederlands-Indie”.

Berbeda dengan Boedi Oetomo (BO) yang hanya berorientasi pada orang Indonesia, khususnya priyayi Jawa, IP berusaha merangkul berbagai etnis dan sifatnya lebih radikal. Emile Schwidder (2012:161) juga menyoroti fokus perhatian Douwes Dekker ialah perbaikan nasib keturunan Indo di Hindia Belanda. Berikutnya baru nasib orang-orang Jawa yang bekerja sebagai petani, buruh, dan sebagainya. Pemerintah Hindia Belanda menganggap IP berbahaya karena tujuan utamanya memerdekakan Hindia Belanda demi perbaikan nasib masyarakat.

Douwes Dekker melalui IP melakukan propaganda politik. Meskipun berasal dari kaum Indo, Douwes Dekker menjadi propagandis yang hebat dalam mempropagandakan masa depan Hindia Belanda dan kemerdekaan Indonesia. Beliau juga berhasil mengembangkan gerakan nasionalisme di Hindia Belanda. Tak heran apabila Soekarno mengakui Douwes Dekkes sebagai “bapak” politiknya. Gagasan politik Douwes Dekker saat itu telah melampaui zamannya lantaran rasa sosial, kesamaan nasib, dan kemanusiaannya yang besar.

Tentu saja tidak semua kaum Indo memiliki pandangan seperti Douwes Dekker, namun demikian kaum Indo telah menjadi bagian dari bangsa ini. Kaum Indo lahir di Indonesia dan di dalam tubuhnya juga mengalir darah yang sama dengan penduduk pribumi. Bahkan ada di antara mereka yang memiliki peran dan sumbangsih bagi bangsa ini. Barangkali asal-usul nenek moyang dari ibu pribumi menjadi fakta yang tidak diharapkan oleh kaum Indo. Akan tetapi penerimaan dan pengakuan akan keberadaan mereka dalam sejarah tidak bisa diabaikan begitu saja.

## **PENUTUP**

Jauh sebelum kolonialisme masuk, perempuan Indonesia ditempatkan dalam posisinya sebagai sosok yang lemah dan tidak berdaya. Masuknya kolonialisme Belanda semakin menyeret kaum perempuan pada praktik pergundikan yang makin merendahkan martabat.

Seorang perempuan gundik atau nyai memiliki derajat sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan pribumi lainnya, namun dari segi psikologis dan moralitas, nyai hanya dianggap sebagai perempuan rendahan bagi laki-laki Belanda. Mereka ditolak dan tidak memiliki tempat lagi di tengah-tengah masyarakat umumnya.

Hubungan antara laki-laki Eropa khususnya Belanda dengan para nyai menghasilkan keturunan campuran yang sulit diterima dalam masyarakat. Keturunan Eropa-Asia yang disebut dengan kaum Indo ini akhirnya menempatkan diri sebagai kelompok sosial yang berada di antara golongan Belanda dengan pribumi. Meskipun mereka merasa status sosialnya lebih tinggi daripada pribumi namun posisinya sama-sama termarginalkan dan mengalami diskriminasi oleh kolonialisme. Kaum Indo yang memiliki kesadaran ke-Indonesia-an yang kuat lebih memilih mengakui dan berjuang demi kemerdekaan tanah air tempat kelahirannya. Kaum Indo secara historis pernah terusir kehadirannya namun meninggalkan warisan kultural yang penting. Sudah selayaknya nyai sebagai bagian dari perempuan Indonesia sekaligus nenek moyang dari kaum Indo mendapat tempat yang layak di panggung sejarah Indonesia sebelum tidak ada seorang pun yang mengingatnya lagi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Baay, Reggie. 2010. *Nyai dan Pergundikan di Hindia Belanda*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Bambang Purwanto. 2004. Indis: Mereka yang Terlupakan oleh Historiografi Indonesia (Sebuah Catatan Pengantar). Dalam Cote, Joost dan Loes Westerbeek (Eds.), *Recalling the Indies: Kebudayaan Kolonial dan Identitas Poskolonial* (hlm. v-ix). Yogyakarta: Syarikat Indonesia.
- Cote, Joost dan Loes Westerbeek (Eds.). 2004. *Recalling the Indies: Kebudayaan Kolonial dan Identitas Poskolonial*. Yogyakarta: Syarikat Indonesia.
- Djoko Soekiman. 2000. *Kebudayaan Indis dan Gaya Hidup Masyarakat Pendukungnya di Jawa (Abad XVIII-Medio Abad XX)*. Yogyakarta:

Yayasan Bentang Budaya bekerja sama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation.

Fanggidaej, Fransisca C. 2006. *Memoar Perempuan Revolusioner*. Yogyakarta: Galangpress.

Hellwig, Tineke. 2007. *Citra Kaum Perempuan di Hindia Belanda*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

In Bene Ratih. 2005. Perempuan dan Teater. Dalam Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto (Ed.), *Teori-teori Kebudayaan* (hlm. 313-353). Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Loomba, Ania. 2003. *Kolonialisme/Pascakolonialisme*. Yogyakarta: Bentang Budaya

Morton, Stephen. 2008. *Gayatri C. Spivak: Etika, Subaltern, & Kritik Penalaran Poskolonial*. Yogyakarta: Penerbit Pararaton.

Niel, Robert van. 1984. *Munculnya Elit Modern Indonesia*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya bekerja sama dengan Yayasan Ilmu-ilmu Sosial.

Sarlito W. Sarwono. 2004. Kata Pengantar. Dalam Christina S. Handayani dan Ardhian Novianto, *Kuasa Wanita Jawa* (hlm. ix-xi). Yogyakarta: LkiS.

Schwidder, Emile. 2012. Antara Douwes Dekker dan Henk Snevliet. Dalam Tempo, *Seri Buku Tempo Douwes Dekker: Sang Inspirator Revolusi* (hlm.160-164). Jakarta: KGP (Kepustakaan Populer Gramedia) bekerja sama dengan Majalah Tempo.

Stuers, CoraVreede-De. 2008. *Sejarah Perempuan Indonesia Gerakan dan Pencapaian*. Jakarta: Komunitas Bambu.